

MODEL PENDIDIKAN MITIGASI KEBENCANAAN DI INDONESIA

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi*

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta/Jalan Sumpah Pemuda Nomor 18,

Kadipiro, Surakarta

*ellectra_aa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki resiko terhadap terjadinya bencana alam di Indonesia. Pelatihan kebencanaan direncanakan untuk mengubah informasi, perspektif dan kemampuan masyarakat tentang bencana. Perkembangan ini termasuk dari tidak tahu sebelumnya hingga menyadari bahwa wilayah tempat mereka tinggal adalah wilayah yang cenderung mengalami bencana, dari acuh tak acuh tentang mencegah jumlah kerugian, dari tidak berkembang hingga siap dalam upaya penyelamatan jika terjadi bencana. Oleh karena itu, pelatihan bencana harus memasukkan tiga perspektif, khususnya informasi, mentalitas, dan kemampuan.

Kata Kunci : Pendidikan, Kebencanaan, Perubahan

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia yang berada langsung di atas kolom cincin vulkanik menjadikan Indonesia negara yang rawan akan kejadian bencana, seperti gempa gempa, emisi vulkanik, kebakaran hutan, banjir bandang, badai tropis, dan gelombang pasang. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa hampir secara konsisten Indonesia menghadapi bencana yang berulang.

Ada beberapa faktor normal di alam - karena di dalamnya tidak dapat dicegah, seperti emisi vulkanik dan getaran. Sementara itu, namun secara kebetulan, masih banyak lagi bencana yang benar-benar ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri yang mungkin dapat dicegah, seperti banjir bandang, kebakaran hutan, dan longsoran salju.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau pengaturan peristiwa yang mengganggu dan mengganggu kehidupan dan panggilan individu yang diakibatkan, baik oleh variabel normal dan / atau faktor non-reguler hanya sebagai unsur manusia, yang membawa tentang kerugian manusia, kerusakan alam. , kemalangan properti, dan efek mental.

Definisi tersebut menyinggung semua bencana, baik bencana normal, non-umum, atau sosial. Sementara itu, Faulkner (2001) mengklarifikasi secara lebih eksplisit bahwa bencana adalah peristiwa atau peristiwa yang muncul karena keajaiban

normal yang membutuhkan kerangka kerja data gabungan untuk pencari iklim dan aktivitas manusia secara lebih komprehensif. Faulkner mengenali peristiwa bencana dan peristiwa non-bencana. Menurut Faulkner, membedakan bencana alam dan non alam. Bencana adalah peristiwa bencana, sedangkan bencana non-karakteristik dan sosial disebut keadaan darurat. Dari kesepakatan itu, Faulkner menggarisbawahi bahwa musibah apa pun bisa diantisipasi atau dicegah. Kontribusi manusia yang dinamis dan kerangka kerja data identifikasi iklim yang lebih luas dapat membantu para eksekutif sebelum dan sesudah bencana.

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah upaya yang disadari dan diatur untuk menciptakan iklim pembelajaran dan siklus belajar dengan tujuan agar siswa secara efektif membangun kemampuannya untuk memiliki kekuatan, kebijaksanaan, karakter, pengetahuan, karakter yang terhormat, dan kemampuan dunia lain yang ketat. siapa pun, daerah setempat, negara. juga, negara. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pendidikan melalui persekolahan, dipercaya bahwa siswa akan mengalami peningkatan, baik dari segi wawasan, mentalitas, dan kemampuannya dalam mengelola masalah-masalah kehidupan sehari-hari.

Kurikulum mengenai pelatihan bencana pada umumnya secara singkat dapat disetarakan dengan sekolah alam. Ini berarti bahwa pelajar tidak hanya perlu mengetahui dan memahami penyebab bencana atau bencana alam, tetapi juga memiliki mentalitas dan kemampuan menyelamatkan diri untuk membatasi kemunduran. Pelajaran bencana akan dijalankan dengan asumsi jika semua segmen informasi, mentalitas dan kemampuan dapat dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, pemenuhan instruksi musibah harus dilakukan melalui penyesuaian.

Sekolah bencana bukan hanya menjadi kewajiban otoritas publik melalui BNPB atau penyuluh geologi yang menunjukkan peredaran zona-zona potensial perang, namun demikian juga menjadi tugas para wali murid, pemerintah daerah, pionir yang tegas, perkumpulan non legislatif, anak muda.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini metode penelitian deskriptif dengan studi pustaka. Dalam penulisan ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Alasan penulis menggunakan studi pustaka karena sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain dan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut sehingga hasil dalam penulisan ini adalah sebuah model pendidikan kebencanaan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menunjukkan, selama 2020 ada 2.925 bencana alam yang terjadi di Indonesia. BNPB mengatakan bahwa setiap tahun Indonesia rentan terjadi gempa bumi, letusan gunung, banjir, tanah longsor dan bencana alam. Singkatnya masyarakat Indonesia tidak asing dengan musibah bencana alam.

Melihat data intensitas dan ulasan dampak bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, pemerintah hendaknya menekankan pentingnya persiapan untuk mengantisipasi bencana setiap kali bisa datang sewaktu. Tanpa pemahaman dan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi kemungkinan bencana alam dan beberapa dampak dan eskalasi bencana maka kerugian akibat bencana semakin besar.

Pemahaman dan pengetahuan para ahli kebencanaan hendaknya mulai menggandeng lembaga pendidikan khususnya pendidikan tingkat dasar dan menengah. Institusi pendidikan adalah cara yang paling tepat untuk mengungkapkan pengetahuan yang akan berdampak pada sikap siswa mengenai pencegahan bencana. Dalam hal bencana, pengetahuan tentang hal-hal terkait akan memungkinkan siswa dan pihak lain untuk meminimalkan dampak bencana yang terjadi. Selain itu, pendidikan jenis ini pada esensinya adalah stimulus untuk menghormati alam melalui penjualan dan tindakan yang dapat sejalan dengan sifat alami bencana.

Kebijakan yang secara khusus berfokus pada bidang pendidikan bencana belum sepenuhnya dilakukan. Pendidikan bencana baru menjadi suatu fokus yang melibatkan stakeholder khususnya ketika Presiden Joko Widodo mengangkat isu kebencanaan pada pertemuan nasional koordinasi manajemen bencana pada tahun 2019. Menurut Presiden Joko Widodo, pada tahun 2019 hendaknya mulai memulai pendidikan pendidikan pendidikan dan lembaga pendidikan. Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu begitu akrab dengan bencana alam sejauh ini, namun baru memulai pendidikan bencana baru dalam dua tahun terakhir, dia tahu cukup aneh. Lebih baik terlambat daripada sama sekali. Perkataan dan perhatian presiden tersebut menunjukkan urgensi pendidikan kebencanaan di Indonesia.

Pendidikan bencana dan lembaga pendidikan memiliki koneksi terdekat. Terlepas dari besar dan tidak aman karena bencana alam yang menghadap beberapa bangunan bangunan, kesatuan lembaga pendidikan itu sendiri menghadapi potensi bencana yang tinggi dan mengkhawatirkan. Data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tahun 2019 tentang data kerawanan yang dihadapi sekolah secara nasional menggambarkan bahwa terdapat 52.902 (24,05%) satuan pendidikan berada di wilayah rawan gempa, 54.080 (24,59%) satuan pendidikan berada di wilayah rawan banjir, 15.597 satuan pendidikan berada di wilayah rawan longsor, 2.417 (1,10%) satuan pendidikan berada di wilayah rawan tsunami, dan 1.685 (0,77%) satuan pendidikan berada di wilayah rawan letusan gunung api.

Konsep unit satuan pendidikan aman bencana (SPAB) menjadi warna baru setelah

beberapa kritik dan kontribusi terkait dengan kebutuhan akan pendidikan bencana. Dalam konsep ini, layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, non-formal dan informal di setiap level dan jenis layanan adalah penjaga terkemuka dalam konteks pembangunan komunitas ancaman bencana yang aman.

Pendidikan bencana diperkirakan akan mempromosikan sikap dan keterampilan untuk memberikan fase sebelumnya, pada saat itu, dan setelah bencana terjadi. Selain itu, diharapkan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih tentang bencana. Namun, Gaung dan kampanye pendidikan bencana ini merasa lemah. Masih sepertinya tidak masif dan bersama-sama dalam pengembangan dan menekankan pentingnya pendidikan bencana.

Masalah umum yang harus dihindari dalam pekerjaan bersama adalah koordinasi yang tidak optimal. SPAB yang melibatkan banyak hari libur di dalamnya memiliki potensi untuk menjadi program yang diberikan dengan sendirinya tanpa unit langkah. Meskipun sedikit terlambat, konsep kebijakan tersebut sebagai perumusan penting dari pendidikan bencana masih harus didukung oleh beberapa bagian. Dukungan dan kolaborasi Semua pihak dalam mengantisipasi bencana alam penting sebagai burung unta paradoks. Dalam paradoks burung unta, mengapa kita tidak cukup untuk bencana (2017), Robert Meyer dan Howard Kunreuther menjelaskan bahwa burung unta melambangkan yang benar tentang keterbatasan keterampilan manusia dan bencana alam yang harus dihadapi.

Ada 10 Indikator kunci minimal dalam SPAB: (1) Meningkatnya pengetahuan warga sekolah mengenai satuan pendidikan aman bencana; (2) Memiliki konstruksi yang memenuhi standar bangunan tahan gempa; (3) Memiliki Sarpras (Alat pemadam api ringan, Pelampung, Tambang, Rambu kebencanaan, P3K, Megaphone); (4) Terkumpulnya informasi mengenai risiko, ancaman, dan kapasitas di sekolah; (5) Memiliki kebijakan sekolah aman bencana (SK kepek); (6) Memiliki prosedur tetap kedaruratan; (7) Memiliki tim siaga bencana; (8) Memiliki peta & jalur evakuasi; (9) Terpasangnya media kampanye; (10) Melakukan simulasi secara rutin.

Gerakan ini menyadari bahwa memiliki beberapa tantangan. Berbagai tantangan dihadapkan dengan perluasan masalah dan keberlanjutan. Berbagai alasan untuk dinyatakan oleh penduduk Unit Pendidikan (terutama Direktur dan Tuan). Berdasarkan masalah pembiayaan, tidak ada waktu untuk melaksanakan kegiatan mereka, itu tidak cukup waktu untuk memasukkan muatan bencana kepada subjek, tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada sumber daya manusia yang cukup untuk melakukannya, sampai yang paling menjengkelkan adalah keyakinan kuat (jika Anda tidak ingin mengatakan kurang sadar) bahwa tidak akan ada bencana di lingkungan sekolah. Atau waktu lain juga menyatakan bahwa pendidikan bencana bukanlah prioritas untuk diajarkan di sekolah, karena tidak dalam ujian nasional, atau tidak ada instruksi dari kepala layanan, dan alasan lain yang menjengkelkan. Alasannya terlalu lemah untuk digunakan sebagai apostisi keamanan masyarakat sekolah.

KESIMPULAN

Kita tidak bisa mengukir kedatangan gempa bumi dan tsunami, misalnya. Kami juga mengalami kesulitan menghindari banjir bandang yang sering dicurigai sebagai bagian dari kelalaian kami dalam pengelolaan alam dan lingkungan. Namun, belajar dari kecerdikan burung unta ketika berlari dengan cepat menghindari bahaya, kita masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan sebaik mungkin. Membuatnya lebih konstruktif sebagai pemahaman, praktik baik dan inspirasi dan langkah-langkah pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi tantangan bersama. Kami mungkin sangat mungkin untuk merancang dan mengembangkan serangkaian opsi lingkungan, insentif dan metode komunikasi yang memungkinkan semua pihak mengatasi tantangan dan risiko dengan menangani bahaya masa depan.

Berkelompok adalah jenis berjalan dengan cepat menghindari bencana alam yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penggabungan pendidikan bencana yang melebihi pemahaman, dan mungkin penempatan jenis pendidikan ini sebagai bagian dari kurikulum, eksekusi ekstrakurikuler atau praktik yang baik. Memperkuat, diseminasi pemahaman dan praktik lapangan lebih penting dan mendesak untuk dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Britha Mikkelsen.(2003). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Coburn.dkk (1994). *Mitigasi Bencana*. United Kingdom: UNDP
- Kemendikbud. (2015). *Pilar 1: Fasilitas Sekolah Aman*. Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekjen Kemdikbud.
- Kemendikbud. (2015). *Pilar 2: Manajemen Bencana Di Sekolah*. Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekjen Kemdikbud.
- Kemendikbud. (2015). *Pilar 3: Pendidikan Pencegahan dan pengurangan Resiko Bencana*. Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekjen Kemdikbud. Kompas. Bencana Palu. [akses tahun 2018]
- Kemendikbud dan BNPB. (2016). *Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Madrasah Aman Bencana Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Pendidikan Khusus dan Dirjen Pendasmen.